



**“IMPLIKASI HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH KUASA HUKUM PAJAK DALAM PENANGANAN
SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK”**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

INDRA IRAWAN

1810622033

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Indra Irawan

NRP : 181022033

Tanggal : 09 Juli 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 09 Juli 2021

Yang Menyatakan



(Indra Irawan)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai Civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Irawan

NRP : 181022033

Program Studi : Magister Hukum

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non –exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“IMPLIKASI HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
KUASA HUKUM PAJAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PAJAK
DI PENGADILAN PAJAK”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 09 Juli 2021

Yang Menyatakan



(Indra Irawan)

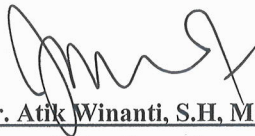
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Indra Irawan
NRP : 1810622033
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : “IMPLIKASI HUKUM ATAS PERBUATAN
MELAWAN

HUKUM OLEH KUASA HUKUM PAJAK DALAM
PENANGANAN SENGKETA PAJAK DI
PENGADILAN PAJAK”.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Atik Winanti, S.H, M.H

Ketua Penguji



Prof. Dr. Arisman , S.H., M.H.

Penguji 1



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.

Penguji 2/ Pembimbing



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan



Dr. Beniharmon Harefa, S.H., LL.M.

Kepala Program Studi

ABSTRAK

Dalam dinamika perkembangan hukum dibidang perpajakan, Konsultan Pajak sebagai Kuasa Hukum Pajak banyak menghadapi permasalahan dalam menangani sengketa pajak di pengadilan Pajak. namun dalam prakteknya terdapat Kuasa Hukum Pajak dalam menangani sengketa pajak ternyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengajukan Permohonan Pernyataan Pencabutan Sengketa Pajak Tanpa izin dan Persetujuan Wajib Pajak sehingga menimbulkan beberapa implikasi hukum baik terhadap Kuasa Hukum Pajak maupun kepada Wajib Pajak selaku pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai implikasi hukum atas Perbuatan Melawan Hukum oleh kuasa hukum pajak dalam menangani sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia serta Bagaimanakah seharusnya Pengaturan Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Kuasa Hukum Pajak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menangani sengketa di pengadilan pajak. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang mengkaji permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan, KUHPerdara, dan peraturan lainnya berdasarkan pada pendekatan kasus (*Case approach*). Hasil dari penelitian ini telah diketahui bahwa *pertama*, Implikasi Hukum Terhadap Kuasa Hukum Pajak dapat dituntut Ganti Rugi Materiil dan Immateriil melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Secara Perdata beserta dapat dilakukan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Konsultan Pajak kepada Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Sedangkan Implikasi Hukum Terhadap Wajib Pajak harus membayar Pokok Pajak ditambah kenaikan Denda 50% atas Pencabutan Banding serta dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil. Kemudian secara *Lex Spesialis* belum ada aturan hukum yang mengatur tentang Ruang Lingkup, Fungsi, Kewenangan, Kewajiban Sanksi dan Larangan terhadap Konsultan Pajak serta Penegakan Hukum atas Perbuatan melawan Hukum tersebut dapat dimintakan Pertanggungjawaban secara Perdata maupun Pidana beserta Pertanggungjawaban secara Etik. Seharusnya sebaiknya segera disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak sehingga diharapkan dapat melindungi Wajib Pajak dari tindakan Konsultan Pajak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum agar tercipta kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi setiap Klien.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, *Kuasa Hukum Pajak*, *Sengketa Pajak*.

ABSTRAK

In the dynamics of legal developments in the field of taxation, Tax Consultants as Tax Lawyers face many problems in dealing with tax disputes in the Tax Court. but in practice there are Tax Lawyers in dealing with tax disputes, it turns out that they have committed acts against the law by submitting an Application for a Statement of Revocation of Tax Disputes without the permission and approval of the Taxpayer, giving rise to several legal implications for both the Tax Attorney and the Taxpayer as the aggrieved party. This study aims to answer problems regarding the legal implications of unlawful acts by tax attorneys in handling tax disputes in tax courts based on the Legislation and Code of Ethics for Indonesian Tax Consultants and how should the legal arrangements and law enforcement against tax attorneys who commit acts Unlawful in handling disputes in tax courts. This thesis research uses a normative juridical research method with descriptive analysis using secondary data that examines problems based on the Laws and Regulations on Taxation, the Civil Code, and other regulations based on the case approach. The results of this study have shown that first, the legal implications of tax attorneys can be sued for material and immaterial compensation through a lawsuit against the law in a civil manner and complaints can be made of violations of the code of ethics of tax consultants to the Indonesian Tax Consultant Association Organization, while the legal implications for taxpayers Taxes must pay the Tax Principal plus a 50% increase in Fines on the Revocation of Appeals and are harmed both materially and immaterially. Then, according to Lex Specialist, there is no legal regulation that regulates the Scope, Function, Authority, Sanction Obligations and Prohibition against Tax Consultants and Law Enforcements for Unlawful Acts, can be asked for Civil and Criminal Accountability along with Ethical Liability. The draft should be ratified immediately. Law on Tax Consultants so that it is expected to protect Taxpayers from the actions of Tax Consultants who commit Unlawful Acts in order to create legal certainty and provide a sense of justice for each Client.

Keywords: Legal Implications, Unlawful Acts, Tax Attorney, Tax Disputes.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama dan paling utama di hati ini, penulis panjatkan puji dan rasa syukur yang amat besar kepada ALLAH SWT. Berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan segenap suka cita. Penyusunan Tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Negeri Jakarta dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KUASA HUKUM PAJAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK”** Kelancaran proses penulisan Tesis ini berkat bimbingan, arahan, motivasi dan kerja sama yang amat besar dari berbagai pihak hingga terselesaikannya tesis ini. Selain itu, ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya oleh penulis yang disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Terima kasih atas setiap kebijakan, dukungan dan selalu berpihak pada Mahasiswa Program Studi Magister Hukum khususnya angkatan Ganjil Tahun 2018.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku kepala program studi Magister Hukum, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang Berjiwa Muda dan sangat Energik, Kreatif dan Progresif dalam usahanya untuk mengembangkan sistem akademik Kegiatan Belajar Mengajar pada Program Studi Magister Hukum. Terima kasih atas waktu, kebijakan dan dukungan secara akademik selama penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu menjadi Suri Tauladan khususnya bagi Penulis dan Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum Lainnya, karena tidak hanya memberikan bimbingan secara akademik yang meliputi pada substansi materi dan Teknis Penulisan Tesis kepada Penulis, namun Pembimbing juga sering support dan mengajarkan dan bercerita tentang sekolah kehidupan setelah lulus Magister Hukum yang akan menghadapi tantangan lebih berat dan menguji ilmu hukum penulis di masyarakat khususnya dalam bidang profesi Konsultan dan Pengacara Pajak. Terimakasih sudah sangat baik dan maksimal memberikan saran dan masukan ilmu hukumnya yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Proposal Tesis dan Penguji Sidang Tesis beserta Para Dosen di Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selama ini telah bekerja keras

dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kepada penulis untuk bekal penulis di masa depan nanti.

6. Ibu Yuli, Bapak Satino, Mas Dwi dan Para Pegawai/ Staf lainnya di Sekretariat Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik, Sabar dan Ramah dalam memberikan setiap pelayanan administrasi dan berbagai informasi seputar perkuliahan kepada para Mahasiswa Magister Hukum dari awal kuliah hingga selesai..
7. Almh. Asyitakh Wushasni Selaku Istri tercinta dan ananda Aisyah Putri Irawan selaku anak pertama, ananda Athallah Putra Irawan selaku anak Kedua, ananda Bahjah Mardhiyah Ramadhani selaku anak Ketiga, Ibunda Eyang Sukirah tersayang, Mas Surahmad,SH,MH. kakak Sepupu beserta seluruh Keluarga yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril dan materiil dalam keluarga.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta khususnya Keluarga Besar Angkatan Tahun 2018 yang telah berjuang bersama penulis baik dalam menempuh setiap jam perkuliahan untuk mencapai gelar Magister Hukum maupun kebersamaan diluar perkuliahan kampus serta banyak memberikan dukungan-dukungan positif kepada penulis.
9. Managing Partner dan Partner pada Kantor Lotus and Co Law Firm yang banyak memberikan motivasi hingga penulisan tesis ini selesai.
10. Teman teman alumni SMAN 29 Jakarta yaitu Riza Rizkiana dan Eyi Mawar yang banyak membantu Penulis baik secara moril dan materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih dalam proses pembelajaran dan belum sempurna Oleh karena itu, segala kritik, saran, motivasi yang sifatnya mendidik dan membangun kearah yang lebih baik, senantiasa penulis terima dengan terbuka dan lapang dada.

Jakarta, 09 Juli 2021

Hormat Penulis

Indra Irawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pokok Permasalahan	12
I.3 Tujuan Penelitian	12
I.4 Manfaat Penelitian	13
I.5 Kerangka Teoritis KerangkaKonseptual	13
I.6 Metode Penelitian.....	21
I.7 Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK BESERTA KUASA HUKUM DIBIDANG PERPAJAKAN.	29
A. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	29
1. Peradilan Dalam Hukum Pajak	29
2. Kedudukan Dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	33
3. Kewenangan Pengadilan Pajak Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.	39
4. Upaya Hukum Dalam Peradilan Pajak.....	48
B. Tinjauan Umum tentang Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	62
1. Pengertian Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	62
2. Fungsi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	65
3. Hak Dan Kewajiban Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	68
4. Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.	72
5. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	86
6. Perbandingan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.	101
BAB III METODE PENELITIAN	106
III.1. Metode Penelitian	106
III.2. Tipe Penelitian	106
III.3. Sumber Data	106

III.4. Metode Pengumpulan Data	109
III.5. Metode Analisis Data	109
III.6. Jadwal Penelitian	110
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KUASA HUKUM PAJAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK.	111
A. Implikasi Hukum dari adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum.	
1. Perkembangan Teori tentang Melawan Hukum.....	111
2. Teori Relativitas (Schutznormtheorie) Dalam Perbuatan Melawan Hukum	124
3. Hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum.	125
B. Kasus Posisi.....	119
C. Implikasi Hukum terhadap Kuasa Hukum Pajak Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menangani Sengketa Pajak Nomor : 013296.15/2019/PP di Pengadilan Pajak.	126
D. Implikasi Hukum yang ditanggung Wajib Pajak atas adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Kuasa Hukum Pajak Dalam Sengketa Pajak Nomor : 013296.15/2019/PP di Pengadilan Pajak.....	147
E. Penegakan Hukum dan Penerapan Hukum terhadap Kuasa Hukum Pajak yang melakukan Perbuatan Melawann Hukum dengan mengajukan Permohonan Pencabutan Pernyataan Banding	153
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	162
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	164
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	